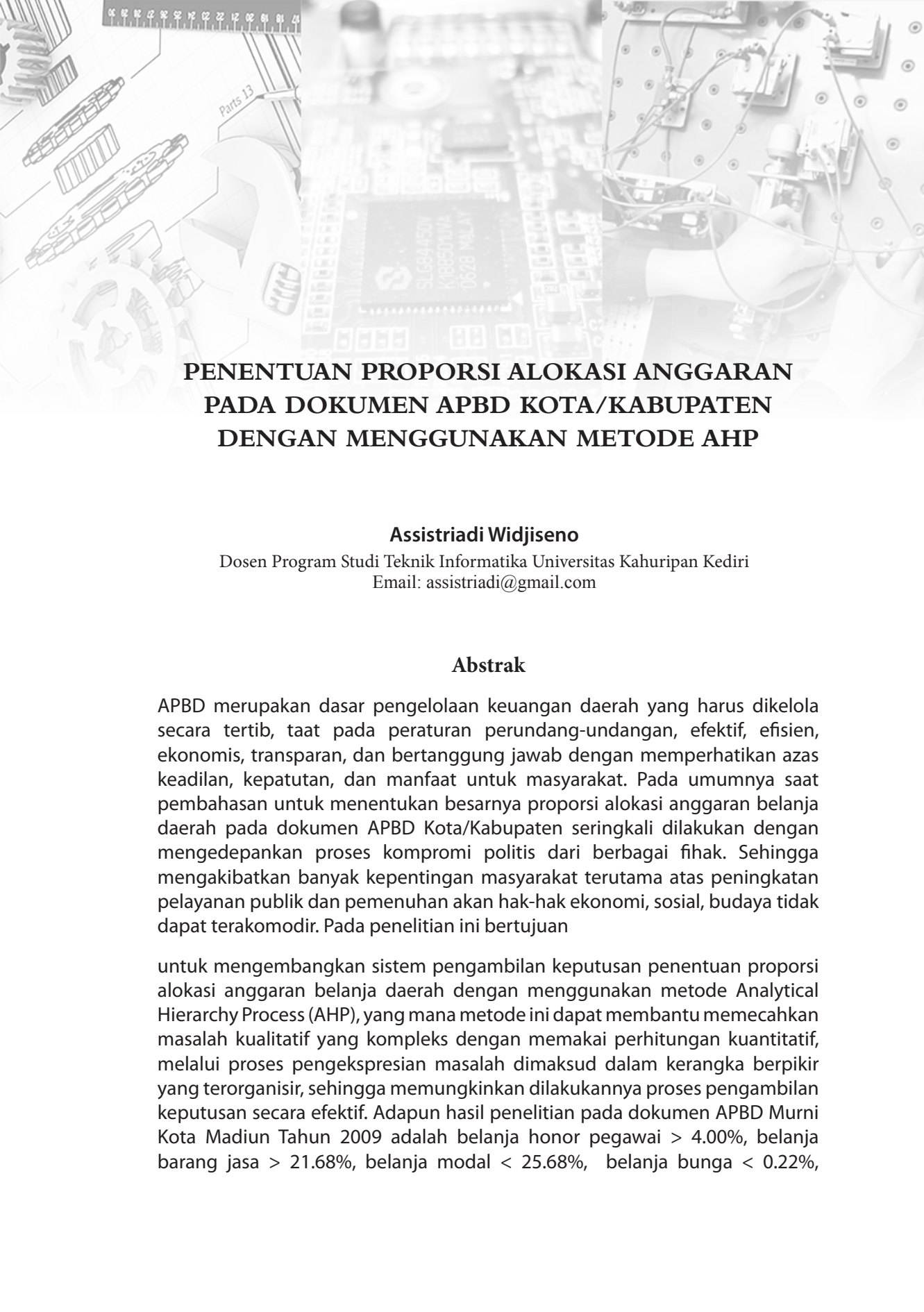




PENENTUAN PROPORSI ALOKASI ANGGARAN PADA DOKUMEN APBD KOTA/KABUPATEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP

Assistriadi Widjiseno

Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Kahuripan Kediri
Email: assistriadi@gmail.com

Abstrak

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pada umumnya saat pembahasan untuk menentukan besarnya proporsi alokasi anggaran belanja daerah pada dokumen APBD Kota/Kabupaten seringkali dilakukan dengan mengedepankan proses kompromi politis dari berbagai pihak. Sehingga mengakibatkan banyak kepentingan masyarakat terutama atas peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan akan hak-hak ekonomi, sosial, budaya tidak dapat terakomodir. Pada penelitian ini bertujuan

untuk mengembangkan sistem pengambilan keputusan penentuan proporsi alokasi anggaran belanja daerah dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), yang mana metode ini dapat membantu memecahkan masalah kualitatif yang kompleks dengan memakai perhitungan kuantitatif, melalui proses pengekspressian masalah dimaksud dalam kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan secara efektif. Adapun hasil penelitian pada dokumen APBD Murni Kota Madiun Tahun 2009 adalah belanja honor pegawai > 4.00%, belanja barang jasa > 21.68%, belanja modal < 25.68%, belanja bunga < 0.22%,

belanja subsidi < 0.38%, belanja hibah > 0.15%, belanja bantuan sosial > 0.71%, belanja bagi hasil < 0.22%, belanja bantuan keuangan < 0.22% dan belanja tidak terduga > 0.20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi anggarannya belum memenuhi kriteria anggaran untuk peningkatan pelayanan publik.

Kata Kunci: APBD, Analytical Hierarchy Process (AHP)

Abstract

APBDs are the basis of financial management that should be managed in an orderly, obedient to laws and regulations, effective, efficient, economical, transparent, and accountable under the principles of fairness, decency, and the benefits to society. In general, during the discussion to determine the proportion of the APBD allocation to the local APBD information, City / Regency is often done with the process of political compromise of the various parties. Resulting in a lot of public interest, especially on public service improvement and fulfillment of the rights of economic, social, cultural rights can not be accommodated. In this study aims to develop a decision-making system of determining the proportion of APBD allocation area using Analytical Hierarchy Process (AHP), that this method can help solve the problem of qualitative complex using quantitative calculations, through the expression of the problem referred to in the framework of an organized, thus allowing does the decision process effectively. The research results on APBD information Pure Madiun in 2009 is spending honors employees > 4.00%, spending on goods services > 21.68%, capital expenditure < 25.68%, shopping interest < 0.22%, subsidies < 0.38%, grant expenditure > 0.15% The, social assistance expenditure > 0.71%, expenditure for the results of < 0.22%, financial aid expenditures < 0.22% and unexpected expenditure > 12.20%. So it can be concluded that the APBD allocation is not yet eligible APBD for improving public services.

Keywords: APBD, Analytical Hierarchy Process (AHP)

A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Selain itu APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Adapun yang dimaksudkan dengan fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedangkan struktur APBD itu sendiri terdiri dari:

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

b) Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

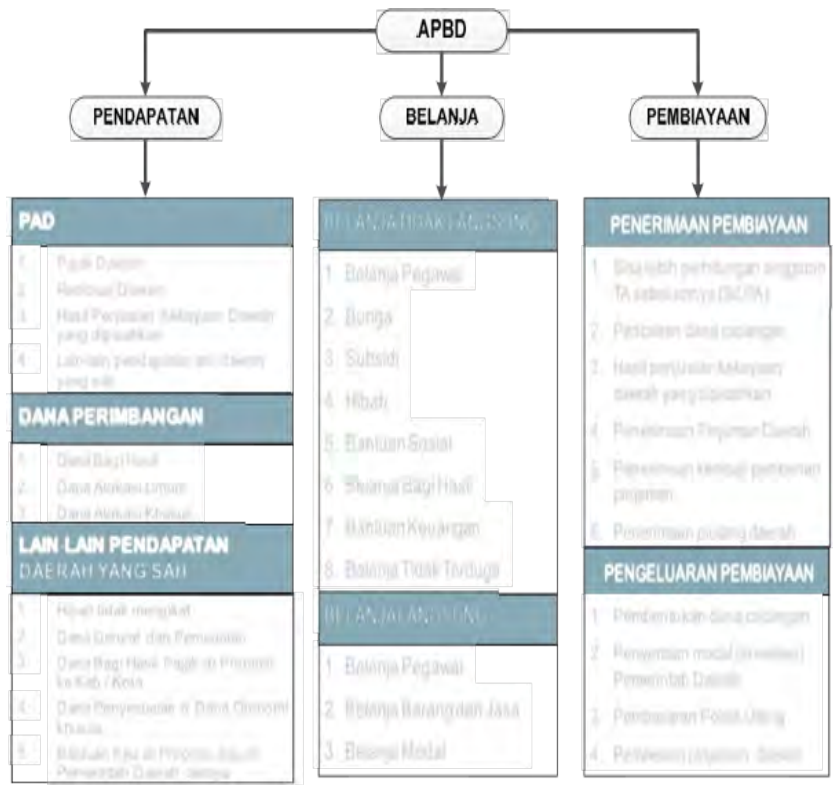
c) Pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

B. STRUKTUR DATA ANGGARAN

Adapun pembahasan mengenai struktur data anggaran pada dokumen APBD Kota/Kabupaten secara garis besar terdiri dari 3 akun, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Seperti

yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 Struktur Data Anggaran Pada Dokumen APBD Kota/Kabupaten

Selanjutnya dijelaskan bahwa struktur data anggaran yang terdapat pada dokumen APBD kota/kabupaten terdiri dari kode organisasi, kode program, kode kegiatan dan kode rekening. Adapun penjelasan untuk kode program dan kegiatan mengacu kepada lampiran A-VII Permendagri No 13 Th 2006, dimana kode ini terdiri dari 4 digit dengan komposisi 2 digit untuk kode program dan 2 digit untuk kode kegiatan.

C. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan ini digunakan untuk mempermudah dan menjawab permasalahan yang telah dijabarkan

sebelumnya. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi masalah
 - a. Proses penyusunan RAPBD
 - b. Proses pembahasan APBD
- 2) Studi literatur
 - a. Regulasi pengelolaan anggaran daerah
 - b. Struktur data anggaran pada dokumen APBD
 - c. Metode AHP
- 3) Analisa kebutuhan dan perancangan sistem pengambilan keputusan
- 4) Pengujian sistem
 - a. Input data anggaran
 - b. Input data preferensi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan ilustrasi dan simulasi daripada tahapan dan proses perhitungan penentuan proporsi alokasi belanja daerah dengan menggunakan metode AHP ini, maka akan diberikan sebuah contoh kasus alokasi anggaran belanja daerah pada dokumen APBD murni Kota Madiun tahun anggaran 2009. Dimana pada dokumen APBD ini diperoleh data-data alokasi anggaran seperti yang dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

APBD TAHUN ANGGARAN 2009 - KOTA MADIUN		
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 237,958,865,000
511	Belanja Pegawai	Rp 230,068,464,000
512	Belanja Bunga	Rp -
513	Belanja Subsidi	Rp -
514	Belanja Hibah	Rp 1,891,000,000
515	Belanja Bantuan Sosial	Rp 4,999,401,000
516	Belanja Bagi Hasil	Rp -
517	Belanja Bantuan Keuangan	Rp -
518	Belanja Tidak Terduga	Rp 1,000,000,000
52	BELANJA LANGSUNG	Rp 154,422,046,000
521	Belanja Pegawai	Rp 18,027,226,000
522	Belanja Barang dan Jasa	Rp 62,680,831,000
523	Belanja Modal	Rp 73,713,989,000
5	JUMLAH BELANJA	Rp 392,380,911,000

Gambar 4 Alokasi Anggaran Belanja Daerah. Pemkot Madiun

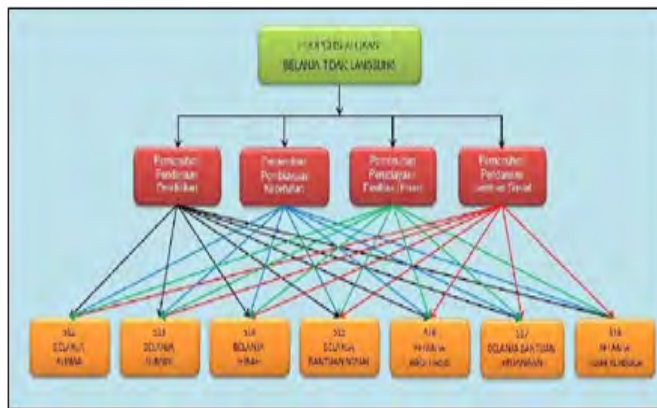
Selanjutnya untuk dapat menilai dan membandingkan apakah alokasi anggaran belanja daerah yang telah disetujui dan disahkan pada dokumen APBD diatas sudah sesuai dengan amanat daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 31 ayat 2, maka akan dilakukan tahapan-tahapan proses perhitungan penentuan proporsi alokasi belanja daerah dengan menggunakan metode AHP.

Pada proses perhitungan ini terlebih dahulu menentukan komponen-komponen daripada masing-masing alternatif dan kriteria yang akan digunakan dan disusun dalam bentuk hierarchy tree untuk dapat melihat dan menggambarkan korelasi daripada masing- masing komponen alternatif dan kriteria.

Proses selanjutnya adalah dengan memberikan nilai preferensi terhadap masing-masing komponen alternatif dan kriteria ini kedalam bentuk matrix perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison Matrix) untuk mendapatkan nilai eigen vektornya dan dilakukan uji konsistensi untuk mengetahui apakah perbandingan antar masing-masing komponen alternatif dan kriteria ini masih tetap konsisten.

Selanjutnya tahapan dan proses perhitungan ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Hal ini disebabkan karena struktur daripada belanja daerah dibagi menjadi 2 bagian pula yaitu belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Dimana untuk belanja tidak langsung terdiri dari 8 kode rekening dan untuk belanja langsung terdiri dari 3 kode rekening.

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti biaya overhead yang digunakan untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan..



Gambar 5 Hierarchical Tree Analisa Belanja Tidak Langsung

Langkah pertama proses ini adalah mengisikan nilai pairwise comparison yaitu menentukan perbandingan antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Perbandingan dilakukan menurut tingkat kepentingan/keutamaan, alternatif mana yang lebih penting seperti yang terlihat pada gambar 6 dibawah ini.

TABEL PAIRWISE COMPARISON ALTERNATIF UNTUK KRITERIA PEMENUHAN PENDANAAN PENDIDIKAN			
ALTERNATIF	NILAI	KETERANGAN	ALTERNATIF
Belanja Bantuan Sosial	5	Lebih Penting [Lebih Diutamakan] daripada	Belanja Bunga
Belanja Bantuan Sosial	5	Lebih Penting [Lebih Diutamakan] daripada	Belanja Subsidi
Belanja Bantuan Sosial	5	Lebih Penting [Lebih Diutamakan] daripada	Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial	5	Lebih Penting [Lebih Diutamakan] daripada	Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Sosial	5	Lebih Penting [Lebih Diutamakan] daripada	Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Sosial	5	Lebih Penting [Lebih Diutamakan] daripada	Belanja Tidak Terduga
Belanja Hibah	3	Cukup Penting [Cukup Diutamakan] daripada	Belanja Bunga
Belanja Hibah	3	Cukup Penting [Cukup Diutamakan] daripada	Belanja Subsidi
Belanja Hibah	3	Cukup Penting [Cukup Diutamakan] daripada	Belanja Bagi Hasil
Belanja Hibah	3	Cukup Penting [Cukup Diutamakan] daripada	Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Hibah	3	Cukup Penting [Cukup Diutamakan] daripada	Belanja Tidak Terduga
Belanja Subsidi	2	Sama Penting Menuju Ke Cukup Penting daripada	Belanja Bunga
Belanja Subsidi	2	Sama Penting Menuju Ke Cukup Penting daripada	Belanja Bagi Hasil
Belanja Subsidi	2	Sama Penting Menuju Ke Cukup Penting daripada	Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Subsidi	2	Sama Penting Menuju Ke Cukup Penting daripada	Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	1	Sama Penting [Setara Keutamaan] daripada	Belanja Bunga
Belanja Tidak Terduga	1	Sama Penting [Setara Keutamaan] daripada	Belanja Bagi Hasil
Belanja Tidak Terduga	1	Sama Penting [Setara Keutamaan] daripada	Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan	1	Sama Penting [Setara Keutamaan] daripada	Belanja Bunga
Belanja Bantuan Keuangan	1	Sama Penting [Setara Keutamaan] daripada	Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil	1	Sama Penting [Setara Keutamaan] daripada	Belanja Bunga

Gambar 6 Pairwise Comparison Alternatif BTL Pemenuhan Pendidikan

Selanjutnya dimodelkan dalam bentuk matrik perbandingan berpasangan seperti yang terlihat pada gambar 7 dibawah ini:

ALTERNATIF	512	513	514	515	516	517	518
512	1	1/2	1/3	1/5	1	1	1
513	2	1	1/3	1/5	2	2	2
514	3	3	1	1/5	3	3	3
515	5	5	5	1	5	5	5
516	1	1/2	1/3	1/5	1	1	1
517	1	1/2	1/3	1/5	1	1	1
518	1	1/2	1/3	1/5	1	1	1
SUM	14	11	7.66666667	2.2	14	14	14

Gambar 7 Matrix Perbandingan Alternatif BTL Pemenuhan Pendidikan

Kemudian matriks diatas menjalani proses normalisasi dengan menggunakan metode Eigenvector. Proses normalisasi matriks dimaksudkan untuk menemukan urutan prioritas seperti yang terlihat pada gambar 8 dibawah ini:

ALTERNATIF	512	513	514	515	516	517	518
512	0.07142857	0.04545455	0.04347826	0.090909091	0.07142857	0.07142857	0.07142857
513	0.14285714	0.09090909	0.04347826	0.090909091	0.14285714	0.14285714	0.14285714
514	0.21428571	0.27272727	0.13043478	0.090909091	0.21428571	0.21428571	0.21428571
515	0.35714286	0.45454545	0.65217391	0.454545455	0.35714286	0.35714286	0.35714286
516	0.07142857	0.04545455	0.04347826	0.090909091	0.07142857	0.07142857	0.07142857
517	0.07142857	0.04545455	0.04347826	0.090909091	0.07142857	0.07142857	0.07142857
518	0.07142857	0.04545455	0.04347826	0.090909091	0.07142857	0.07142857	0.07142857
SUM	1	1	1	1	1	1	1

Gambar 8 Normalisasi Matrix Perbandingan Alternatif BTL Pemenuhan Pendidikan

Berdasarkan hasil dari normalisasi matrix diatas maka akan didapat nilai

Eigen Vector nya seperti yang terlihat pada gambar 9 dibawah ini:

ALTERNATIF	SUM	Eigen Vector
512	0.46555618	0.066508026
513	0.79672501	0.113817859
514	1.351214	0.193030572
515	2.98983625	0.427119464
516	0.46555618	0.066508026
517	0.46555618	0.066508026
518	0.46555618	0.066508026
SUM	7	1

Gambar 9 Nilai Eigen Vector Alternatif BTL Pemenuhan Pendidikan

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat konsistensi isian nilai pairwise comparison pada tabel 4.2 maka metode AHP harus dilengkapi dengan penghitungan Indeks Konsistensi (Consistency Index). Adapun perhitungan uji konsistensinya adalah hasil gambar 7 dikalikan dengan hasil Gambar 9 seperti yang terlihat pada gambar 10 dibawah ini:

ALTERNATIF	512	513	514	515	516	517	518
512	0.06650803	0.05690893	0.06434352	0.085423893	0.06650803	0.06650803	0.06650803
513	0.13301605	0.11381786	0.06434352	0.085423893	0.13301605	0.13301605	0.13301605
514	0.19952408	0.34145358	0.19303057	0.085423893	0.19952408	0.19952408	0.19952408
515	0.33254013	0.5690893	0.96515286	0.427119464	0.33254013	0.33254013	0.33254013
516	0.06650803	0.05690893	0.06434352	0.085423893	0.06650803	0.06650803	0.06650803
517	0.06650803	0.05690893	0.06434352	0.085423893	0.06650803	0.06650803	0.06650803
518	0.06650803	0.05690893	0.06434352	0.085423893	0.06650803	0.06650803	0.06650803
SUM	0.93111237	1.25199645	1.47990105	0.939662822	0.93111237	0.93111237	0.93111237

Gambar 10 Matrix Uji Konsistensi Alternatif BTL Pemenuhan Pendidikan

Dari hasil gambar 10 diatas maka akan didapatkan nilai Lamda (λ) seperti yang terlihat pada gambar 11 dibawah ini:

ALTERNATIF	SUM	Lamda
512	0.47270845	7.10753992
513	0.79564949	6.99055044
514	1.41800436	7.34600919
515	3.29152214	7.70632672
516	0.47270845	7.10753992
517	0.47270845	7.10753992
518	0.47270845	7.10753992
SUM	7.39600979	50.473046

Gambar 11 Nilai Lamda (λ) Alternatif BTL Pemenuhan Pendidikan

Selanjutnya hasil uji konsistensinya adalah seperti yang terlihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

HASIL UJI KONSISTENSI ALTERNATIF BERDASARKAN KRITERIA PEMENUHAN PENDIDIKAN	
Lmax	7.706326723
Lmax-n	0.706326723
n-1	6
CI	0.117721121
RI	1.32
CR	0.089182667
Status	Konsisten

Gambar 12 Hasil Uji Konsistensi Alternatif BTL Pemenuhan Pendidikan

Dengan melakukan langkah-langkah proses perhitungan seperti diatas untuk pemenuhan kesehatan, fasilitas umum dan jaminan social maka akan didapatkan perhitungan alokasi untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung seperti gambar 13 dan gambar 14 di bawah ini.

PERHITUNGAN ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG							
SCORE		PENDIDIKAN	KESEHATAN	FASUM	JAMSOS	SUM	
512	Belanja Bunga	0.043059684	0.013045805	0.00567202	0.00567202	0.067449529	6.74%
513	Belanja Subsidi	0.073689768	0.022325811	0.009668216	0.009668216	0.115352011	11.54%
514	Belanja Hibah	0.124974922	0.037863689	0.016457453	0.016457453	0.195753516	19.58%
515	Belanja Bantuan Sosial	0.276532474	0.083781126	0.029391378	0.029391378	0.419096355	41.91%
516	Belanja Bagi Hasil	0.043059684	0.013045805	0.00567202	0.00567202	0.067449529	6.74%
517	Belanja Bantuan Keuangan	0.043059684	0.013045805	0.00567202	0.00567202	0.067449529	6.74%
518	Belanja Tidak Terduga	0.043059684	0.013045805	0.00567202	0.00567202	0.067449529	6.74%
		0.647435897	0.196153846	0.078205128	0.078205128	1	100.00%
		64.74%	19.62%	7.82%	7.82%	100%	PROSENTASE

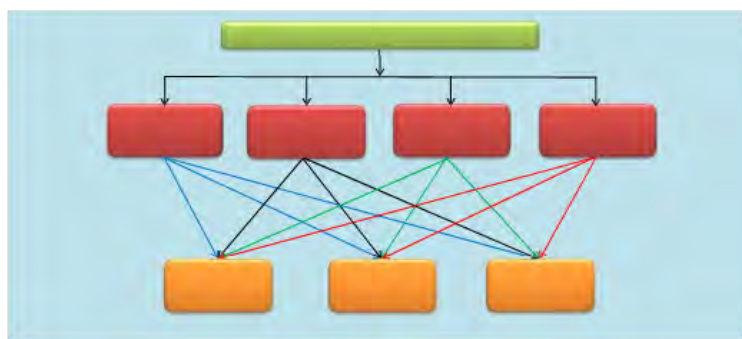
Gambar 13 Perhitungan Alokasi Belanja Tidak Langsung

APBD TAHUN 2009 KOTA MADIUN		ALOKASI DOKUMEN APBD	ALOKASI PERHITUNGAN AHP	SELISIH	STATUS
51	BELANJA LANGSUNG	Rp 237,958,865,000	Rp 237,958,865,000		
511	Belanja Gaji Pegawai	Rp 230,068,464,000	Rp 230,068,464,000	0.00%	Tidak Diperhitungkan
512	Belanja Bunga	Rp -	Rp 532,203,833	-0.22%	Tidak
513	Belanja Subsidi	Rp -	Rp 910,173,626	-0.38%	Tidak
514	Belanja Hibah	Rp 1,891,000,000	Rp 1,544,573,741	0.15%	Memenuhi
515	Belanja Bantuan Sosial	Rp 4,999,401,000	Rp 3,306,838,300	0.71%	Memenuhi
516	Belanja Bagi Hasil	Rp -	Rp 532,203,833	-0.22%	Tidak
517	Belanja Bantuan Keuangan	Rp -	Rp 532,203,833	-0.22%	Tidak
518	Belanja Tidak Terduga	Rp 1,000,000,000	Rp 532,203,833	0.20%	Memenuhi

Gambar 14 Analisa Pemenuhan Alokasi Belanja Tidak Langsung

1. Analisa Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang digunakan untuk melayani kebutuhan publik. Jenis belanja ini diukur berdasarkan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Meliputi belanja pegawai tidak rutin (seperti honor kegiatan), belanja barang dan jasa (seperti ATK, perjalanan dinas, dll), serta belanja modal (seperti membangun infrastruktur ataupun pembelian kendaraan).



Gambar 15 Hierarchical Tree Analisa Belanja Langsung

PERHITUNGAN ALOKASI BELANJA LANGSUNG						
SCORE		PENDIDIKAN	KESEHATAN	FASUM	JAMSOS	SUM
521	Belanja Honor Pegawai	0.046248595	0.015479312	0.006672805	0.008333206	0.076733919
522	Belanja Barang Jasa	0.116798804	0.040493881	0.016676317	0.015132979	0.189101981
523	Belanja Modal	0.484388499	0.140180653	0.054856006	0.054738943	0.7341641
		0.647435897	0.196153846	0.078205128	0.078205128	1
SUM		64.74%	19.62%	7.82%	7.82%	100%
						PROSENTASE

Gambar 16 Perhitungan Alokasi Belanja Langsung

APBD TAHUN 2009 KOTA MADIUN		ALOKASI DOKUMEN APBD	ALOKASI PERHITUNGAN AHP	SELISIH	STATUS
52	BELANJA LANGSUNG	Rp 154,422,046,000	Rp 154,422,046,000		
521	Belanja Honor Pegawai	Rp 18,027,226,000	Rp 11,849,408,740	4.00%	Tidak
522	Belanja Barang Jasa	Rp 62,680,831,000	Rp 29,201,514,831	21.68%	Tidak
523	Belanja Modal	Rp 73,713,989,000	Rp 113,371,122,429	-25.68%	Tidak

Gambar 17 Analisa Pemenuhan Alokasi Belanja Langsung

C. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis kebutuhan sistem pengambilan keputusan yang sudah dapat menghasilkan output analisa yang diharapkan maka berikut ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Aplikasi Perhitungan Alokasi Belanja Daerah ini telah dapat mengadopsi algoritma proses pengambilan keputusan penentuan besarnya proporsi alokasi anggaran belanja daerah dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
- 2) Sistem pengambilan keputusan penentuan proporsi alokasi anggaran belanja daerah dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) ini kedepan akan dapat menjadi alat bantu (tools) bagi anggota DPRD Kota/Kab di seluruh Indonesia dalam menjalankan fungsi anggarannya secara cepat, akurat, efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Sistem pengambilan keputusan penentuan proporsi alokasi anggaran belanja daerah dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) ini dapat dikembangkan lagi agar dapat digunakan untuk proses perhitungan dari sisi pendapatan daerah ataupun pembiayaan daerah.
- 2) Sistem pengambilan keputusan penentuan proporsi alokasi anggaran belanja daerah dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) ini dapat dikembangkan lagi agar dapat digunakan untuk proses perhitungan untuk alokasi anggaran pada setiap SKPD/Organisasi

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Elmasri and Navanthe, 2000, *Fundamentals of Database Systems*, fourth edition, Addison Wesley.

Mulyono, Sri, 1996, *Teori Pengambilan Keputusan*, FE UI, Jakarta.

Saaty, T. L., 1993, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin* (terjemahan), PT. Pustaka

Binaman Pressindo, Jakarta.

RTI International, 2009, *Local Governance Support Program Final Report*, United States

Agency for International Development (USAID) Indonesia

